



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SAMARUL FALAH**
2. Jabatan : **KETUA**
3. NHK : **85992**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 1.800.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 296 m2/296 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
2. Tanah Seluas 1.624 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 280 m2/96 m2 di KAB / KOTA GROBOGAN, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**Rp. 277.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER JEEP Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. MOTOR, HONDA TIGER SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
4. LAINNYA, --- (SEPEDA ONTEL) SEPEDA Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA**Rp. 77.901.000****D. SURAT BERHARGA****Rp. ---****E. KAS DAN SETARA KAS****Rp. 169.394.783****F. HARTA LAINNYA****Rp. ---****Sub Total****Rp. 2.324.295.783****III. HUTANG****Rp. 1.873.200.000****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)****Rp. 451.095.783**



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.